

EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN FASILITAS AIR BERSIH BERBASIS PENGELOLAAN MASYARAKAT DI DESA SENDANGHARJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO

Inna Puspita Wulandari

12040674011 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: innapuspita@gmail.com

Tauran, S.Sos., M.Soc., Sc.

0013047602 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: tauran_unesa@yahoo.com

Abstrak

Adanya Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan fasilitas air bersih. Sebelum tahun 2010 masyarakat Desa Sendangharjo untuk mendapatkan air bersih harus mencari ke desa lain yang berjarak kurang lebih 3-5 km terutama pada musim kemarau. Melihat kondisi ini, tahun 2010 dibangunlah penyediaan fasilitas air bersih melalui Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat. Untuk dapat mengelola hingga melestarikan program dibentuklah Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Program ini telah berlangsung selama lima tahun di Desa Sendangharjo, perlu adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian program dari segi biaya, manfaat, kecukupan dan ketepatan sasaran serta mengetahui respon masyarakat mengenai Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan informasi adalah *purposive sampling* dimana subyek penelitian yang dipilih merupakan pihak yang mengetahui dan memahami mengenai Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini belum seluruhnya berjalan sesuai tujuannya, masih terdapat kendala dari segi efisiensi masih ada warga yang telat membayar, dari segi pemerataan distribusi air telat, selain itu belum semua warga menggunakan fasilitas air bersih. Di sisi lain banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya program ini.

Melihat masalah yang terjadi, saran yang dapat diberikan adalah adanya sosialisasi kepada masyarakat dan ketegasan hukum mengenai sanksi bagi yang telat membayar, pembangunan sarana penampungan air cadangan, perlu adanya penggerak untuk menjalankan koperasi simpan pinjam Tirta Rahayu Widodo.

Kata Kunci : *Evaluasi, Fasilitas Air Bersih, HIPPAM*

Abstract

The existence of The Program is The Provision of Clean Water Facilities Based Management of Community in the village of Sendangharjo is due to the lack of availability of clean water facilities. Before the villagers Sendangharjo in 2010 to get clean water should be looking into another village located approximately 3-5 km mainly during the dry season. Look at this condition, in 2010, the provision of clean water facilities through The Program is The Provision of Clean Water Facilities Based Management of Community. To be able to manage to preserve the program established The Set of User Population Drinking Water (HIPPAM). This program has been going on for five years in the village of Sendangharjo, the need for evaluation to find out the extent to which the achievement of the program in terms of cost, benefit, the adequacy and appropriateness of the targets as well as knowing the response of the community regarding The Program is The Provision of Clean Water Facilities Based Management of Community Thus, this research aims to find out and analyze the evaluation The Program is The Provision of Clean Water Facilities Based Management of Community in the village of Sendangharjo.

The method used is descriptive qualitative methods with information collect technique was purposive sampling where the selected research subjects is the party that knows and understands about

The Program is The Provision of Clean Water Facilities Based Management of Community While the focus in this study is the effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness

The results showed that The Program is The Provision of Clean Water Facilities Based Management of Community is not yet entirely runs in accordance with its objectives, there are still constraints in terms of efficiency there are still citizens who pay late, in terms of leveling late water distribution, in addition to that not all residents use the facilities clean water. On the other hand the many benefits that accrue to society by the existence of this program.

See the occurred problems, advice that can be given is the existence of socialization to society and assertiveness law regarding sanctions for the late pay, constructing shelters of water reserves, need for movers to run cooperative loan Tirto Rahayu Widodo.

Key Word : *Evaluation, Clean Water Facilities, HIPPAM*

PENDAHULUAN

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Penggunaan air bersih tidak hanya untuk dikonsumsi namun juga digunakan untuk masak, keperluan mandi, dan mencuci. Fasilitas publik seperti air bersih ini perlu dibangun guna membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil, mendorong peningkatan mutu kehidupan masyarakat serta memperluas pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk (Waspola:2003).

Mengingat pentingnya air bersih, masyarakat menuntut agar pemerintah dapat menjamin ketersediaan air bersih. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup yang sehat, produktif, dan bersih. Artinya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ketersediaan air bersih ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tak terkecuali dengan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Ketersediaan air bersih di Kabupaten Bojonegoro sangat penting dan sangat diperlukan masyarakat, namun ketersediaan air bersih ini masih kurang. Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya ketersediaan air bersih. *Pertama*, belum meratanya akses air bersih. Sebagaimana dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro (2011), berdasarkan hasil survey yang dilakukan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2010, menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki akses air bersih adalah 997.708 unit (sumur gali, ledeng, sumur pompa tangan, sumur tadah hujan, dan lainya) atau sebesar 82%. *Kedua*, rendahnya curah hujan. Pada umumnya curah hujan di Kabupaten Bojonegoro tidak terlalu tinggi, kondisi ini menyebabkan terjadinya musim kemarau berkepanjangan sehingga memicu terbatasnya air bersih.

Upaya untuk mengatasi kekurangan air bersih di Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan pemerintah melalui Program *Second Water and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC-2). WSLIC-2 adalah kegiatan di bidang air bersih dan sanitasi yang ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di pedesaan yang kurang atau tidak mendapat akses air bersih dan sanitasi dasar.

Dalam perkembangannya, pengelolaan dan keberlanjutan program WSLIC-2 di Kabupaten Bojonegoro ini banyak menghadapi hambatan baik dari segi *maintenance, management*, dan distribusi air. Dalam pelaksanaannya, program ini masih belum bisa dinikmati oleh masyarakat karena berbagai keterbatasan mulai dari dukungan alokasi dana APBD, tenaga penyuluh, sampai dengan pelaksanaan program yang tidak melibatkan masyarakat sehingga upaya percepatan pelaksanaan program terhambat. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Salah satu elemen masyarakat yang terlibat dalam penyediaan air bersih adalah Mobil Cepu Limited (MCL) dan LSM SPeKTRA. MCL memiliki kontribusi terhadap Desa Sendangharjo karena Desa Sendangharjo masuk dalam wilayah eksplorasi Alas Tuwo

East. Desa Sendangharjo adalah salah satu desa yang menerima Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat pada tahun 2010.

Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat adalah program menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat pedesaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara merata. Tujuan program ini adalah terwujudnya fasilitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara merata dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat di tataran rumah tangga, yang dikelola oleh kelembagaan masyarakat yang kuat dan berdampak langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Pada umumnya sebelum tahun 2010 penduduk Desa Sendangharjo untuk mendapatkan air harus mencari ke desa tetangga yang berjarak kurang lebih 3-5 km terutama pada musim kemarau, namun pada musim penghujan masih bisa memanfaatkan sumur tadah hujan yang banyak terdapat di desa tersebut. Adanya Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang dahulunya sangat kekurangan.

Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo, yang dimulai dari pembentukan HIPAB, proses pencarian titik sumber, pembangunan fasilitas air bersih, pengembangan jaringan air bersih, dan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat. yang berkaitan dengan penyepakatan biaya pasang dan tarif air.

Program ini telah berjalan selama lima tahun, pada awal program tahun 2011 tercatat pelanggan HIPPAM adalah 697 sambungan rumah dan pada bulan Agustus 2015 jumlahnya mencapai 794 sambungan rumah. Ini menunjukkan bahwa program ini masih berjalan dan terus berkembang.

Dengan adanya Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat secara langsung dapat membantu masyarakat Desa Sendangharjo dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-

hari, sehingga pada musim kemarau maupun musim penghujan mereka tidak kesulitan mendapatkan air. Selama lima tahun berjalannya program, perlu adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian program baik dari segi biaya, manfaat, kecukupan, kepuasan dan ketepatan sasaran. Selain itu dengan adanya evaluasi dapat mengetahui tanggapan masyarakat mengenai Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini. Sehingga jika terdapat masalah atau kendala dapat segera ditangani dan dievaluasi.

Untuk dapat mengevaluasi program, menggunakan kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn yaitu, efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan paparan diatas, judul penelitian yang diangkat adalah “Evaluasi Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana evaluasi Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah khasanah Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai pengembangan teori evaluasi kebijakan publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar teoritis untuk

pengembangan penelitian lebih lanjut yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, sehingga mahasiswa dapat melihat sejauh mana kemampuan serta keterampilan yang dimiliki untuk menganalisis masalah serta sekaligus mencari solusi menggunakan ilmu yang telah didapatkan.

b. Bagi Instansi

- 1) Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan agar kedepan pelaksanaan program-program pemerintah dapat dijalankan dengan lebih baik.
- 2) Bagi Pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi serta evaluasi kepada instansi terkait terhadap program yang akan dijalankan kedepannya agar menjadi lebih baik lagi, khususnya pada Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat.
- 3) Bagi Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi dalam rangka menambah dan melengkapi kajian tentang evaluasi kebijakan publik.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

James E. Anderson sebagaimana dikutip oleh Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Serupa dengan Anderson, menurut Suwitri dalam Suaedi dan Wardiyanto

(2010:138), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang didalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

B. Evaluasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Muhadjir dalam Widodo (2009:112) yang mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino (2012:186) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk mengukur dan menilai seberapa jauh kebijakan dapat membuahkan hasil sehingga dapat diketahui dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan atau program.

2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Menurut Subarsono (2008:120), evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan atau *input* untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik lagi.

3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Menurut Suharno (2010:243-246), terdapat tiga pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan yakni evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Selanjutnya masing-masing pendekatan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) yaitu pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran dan masyarakat dalam skala luas.
- b. Evaluasi formal (*formal evaluation*) yaitu pendekatan yang menggunakan

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif kebijakan.

- c. Evaluasi keputusan teoritis (*desicion theorititc evaluation*) yaitu evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan akuntabel tentang hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan.

4. Tipe Evaluasi Kebijakan

Tipe evaluasi kebijakan ini menunjukkan dari segi manakah kebijakan yang akan dievaluasi oleh peneliti, dari segi hasil atau proses. Menurut Widodo (2009:112) membagi evaluasi menjadi dua tipe yaitu:

- a. Evaluasi hasil merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan dan target suatu program yang akan dicapai.
- b. Evaluasi proses merupakan riset evaluasi yang berdasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan berpacu pada petunjuk yang telah dicanangkan. Untuk menilai pelaksanaan kebijakan tersebut berhasil atau tidak, perlu adanya indikator-indikator yang bisa dilihat di petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

5. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Suatu proses evaluasi kebijakan dilakukan untuk menyelesaikan suatu misi yakni untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang akan ditimbulkan serta menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau

kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi maka perlu adanya kriteria-kriteria yang dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi suatu kebijakan atau program. Berikut kriteria-kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian menurut William N. Dunn (2003), yaitu:

a. Efektivitas

Menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn, 2003:429).”

b. Efisiensi

Menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn, 2003:430).”

c. Kecukupan

Menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa :

“Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).”

d. Perataan

Menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa :

“Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).”

e. Responsivitas

Menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa :

“Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).”

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn (2003:499) menyatakan bahwa ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sendangharjo kecamatan Ngasem dengan fokus efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana subyek yang dipilih merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami tentang Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat. Adapun subyek dalam penelitian ini, yaitu: BAPPEDA selaku Pembina HIPPAM, Kepala Desa Sendangharjo selaku Pengawas HIPPAM, Pengurus HIPPAM selaku Pengelola HIPPAM, Pemilik sumur, Masyarakat selaku pengguna air HIPPAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sendangharjo

Desa Sendangharjo berada di wilayah Barat Kabupaten Bojonegoro dan memiliki luas wilayah yaitu 952,515 Ha, yang mana sebagian besar merupakan sawah. Desa Sendangharjo memiliki 5 Dusun yang terdiri dari Dusun Soko, Dusun Karangpaing, Dusun Mundu, Dusun Tawaran, dan Dusun Klumpang. Desa Sendangharjo memiliki 25 RT, 08 RW dengan jumlah penduduk 4.251 jiwa (1.317 KK). Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Sendangharjo adalah petani mengingat sebagian besar luas desa merupakan sawah. Selain bertani, keseharian penduduk Desa Sendangharjo adalah bercocok tanam, pedagang, peternak sapi dan kambing, tukang batu dan kayu, kuli bangunan, perajin tempe, dan lain-lain.

B. Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat

Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat adalah program menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat pedesaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara merata. Prinsip pelaksanaan program adalah melibatkan masyarakat dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian program sehingga diharapkan terbangun kesadaran bahwa program adalah milik masyarakat. Adapun tujuan program yaitu terwujudnya fasilitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara merata dan meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk menerapkan perilaku hidup sehat di tataran rumah tangga, yang dikelola oleh kelembagaan masyarakat yang kuat dan berdampak langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Program ini dilaksanakan di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, dengan sasaran penerima manfaat total adalah 1.317 Sambungan Rumah (SR). Dalam pelaksanaannya Program ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu pembentukan HIPPAM hingga pembangunan fasilitas air bersih yang dilaksanakan pada April 2010 hingga April 2011. Salah satu hasil dari pembangunan pada tahap pertama, yaitu:



Gambar 4.1 Penampungan air yang ada di Desa Sendangharjo

Tahap kedua adalah pengembangan jaringan air bersih yang dilaksanakan pada tahun 2012. Adapun hasil dari pembangunan pada tahap kedua, yaitu:



Gambar 4.2 Tandon di Dusun Gampeng Desa Butoh



Gambar 4.3 Travo Listrik 41.000 Watt di Dusun Grogolan Desa Ngunut

C. Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Tirto Rahayu Widodo Desa Sendangharjo

HIPPAM adalah organisasi masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah

desa untuk mengelola sumber air bersih guna memenuhi kebutuhan layanan air di satu atau beberapa desa/kelurahan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

HIPPAM Tirto Rahayu Widodo di Desa Sendangharjo dibentuk melalui Musyawarah Desa Persiapan yang dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat. Atas kesepakatan masyarakat HIPPAM Desa Sendangharjo diberi nama Tirto Rahayu Widodo. Selanjutnya HIPPAM Tirto Rahayu Widodo dibawah pembinaan BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro dan dibawah pengawasan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat. Pada tahun 2014, kelembagaan HIPPAM Tirto Rahayu Widodo diperkuat dengan Akta Notaris Nomor 25/WM/2014.

HIPPAM Tirto Rahayu Widodo merupakan salah satu HIPPAM di Kecamatan Ngasem dan salah satu HIPPAM yang masih aktif sampai sekarang. Pada awal program, HIPPAM ini telah melayani pelanggan sebanyak 697 SR dan kini telah melayani 834 SR. Berikut tabel rincian pelanggan HIPPAM Tirto Rahayu Widodo Desa Sendangharjo.

Tabel 4.1 Rincian Pelanggan HIPPAM Desa Sendangharjo Tahun 2015

No	Dusun	Jumlah pemakai (Sambungan Rumah)	
		Agustus	Desember
1.	Soko	282	286
2.	Karang Pahing dan Mundu	119	128
3.	Tawaran	136	150
4.	Klumpang	134	144
5.	Gampeng, Desa Butoh	74	77
6.	Desa Ngunut	49	49
Jumlah Pemakai		794 SR	834 SR

Sumber: Profil HIPPAM Tirto Rahayu Widodo Tahun 2015

D. Pembahasan

Dalam pelaksanaan Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo telah berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan yaitu membantu masyarakat Desa Sendangharjo dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Banyak manfaat

yang diperoleh masyarakat dengan adanya program ini, namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu pendistribusian air bersih masih belum merata karena masih terdapat beberapa orang yang menggunakan sumur sebagai sumber air. Disisi lain terdapat beberapa masyarakat yang masih terlambat dalam membayar biaya bulanan. Perlu adanya evaluasi, dan untuk mengevaluasi Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini menggunakan teori evaluasi William N. Dunn (2003) yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam suatu program atau kebijakan diukur dari apakah suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan artinya apabila program telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Dalam pelaksanaannya, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo secara keseluruhan telah efektif dilaksanakan artinya telah berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah masyarakat dapat diketahui bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini. Kebutuhan air bersih terpenuhi secara merata dengan adanya air bersih ini. Kualitas air yang bersih membuat kesehatan masyarakat juga meningkat.

Hal itu dibenarkan oleh pengurus, pengawas, dan pembina HIPPAM yang mengatakan bahwa air bersih ini setiap tahunnya dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas airnya. Dengan kualitas air yang bagus dan bersih dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pengurus, pengawas, dan pembina HIPPAM juga mengatakan bahwa dengan adanya Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

2. Efisiensi

Efisiensi program dapat diketahui dari jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Artinya kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Dalam pelaksanaannya, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo telah efisiensi artinya biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan program air bersih ini sangat murah dengan produk dan layanan yang bagus dibandingkan mencari air di luar desa atau membeli air di luar desa yang harganya lebih mahal.

Dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah masyarakat dapat diketahui bahwa mereka tidak merasa keberatan menggunakan fasilitas air bersih ini. Harga pasang air Rp 450.000 untuk masyarakat Desa Sendangharjo sedangkan Rp 750.000 untuk masyarakat Dusun Gampeng dan Desa Butoh sedangkan biaya sewa meteran Rp 5.000/bulan serta biaya air per 1 meter³ Rp 2.000.

Berdasarkan wawancara dengan pelaksana yaitu pembina, pengawas, dan pengurus HIPPAM mengatakan bahwa masyarakat tidak merasa keberatan dengan biaya dan harga ditetapkan untuk pasang air bersih. Penentuan harga pasang dan biaya sewa ditentukan melalui kesepakatan bersama dalam Musyawarah Desa Pertanggungjawaban sehingga besaran biaya disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat dan kebutuhan bahan dan alat pasang air. Disisi lain program ini lebih murah dibandingkan dengan membeli atau mencari sumber air di desa lain.

Pembina, pengawas, dan pengurus HIPPAM juga mengatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pembayaran biaya bulanan, masih ada beberapa masyarakat yang terlambat dalam membayar bulanan. Rata-rata keterlambatan pembayaran berkisar 1 sampai 3 bulan dengan alasan karena uang mereka digunakan untuk

kebutuhan hidup lainnya, disisi lain pendapatan masyarakat Desa Sendangharjo tidak terlalu tinggi karena mata pencahariannya adalah bertani, bercocok tanam, pedagang, peternak sapi dan kambing, tukang batu dan kayu, kuli bangunan, perajin tempe, dan lain-lain. Dalam masalah keterlambatan membayar biaya bulanan, tidak ada sanksi atau hukumannya hanya saja diberikan peringatan.

3. Kecukupan

Kecukupan suatu kebijakan atau program adalah seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Artinya kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada mampu memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo secara keseluruhan telah mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat sehingga masyarakat merasa puas.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, mereka mengatakan bahwa Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini telah mencukupi semua kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, masak maupun kebutuhan lain seperti menyiram pekarangan, menyiram tanaman sayuran, untuk kebutuhan ternak bahkan untuk usaha seperti *home industri*. Seperti Bapak makiran yang menggunakan air untuk open tembakau dan Bapak Mu'alim yang menggunakan air untuk usaha produksi tempe, marneng dan kacang goreng.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pihak pelaksana yang mengatakan bahwa masyarakat telah tercukupi kebutuhan air bersih dengan Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat. Keberadaan air bersih ini

digunakan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan lain yaitu menyirami pekarangan, ternak bahkan untuk usaha. Pihak pelaksana juga mengatakan bahwa air tersebut tidak boleh digunakan untuk pertanian, sehingga masyarakat tidak ada yang menggunakan air tersebut untuk pertanian.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan atau program menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Perataan itu adil, artinya menghasilkan Dalam pelaksanaannya, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo dan Dusun Gampeng perataan belum terjadi, sebagian besar masyarakat sudah menggunakan fasilitas air bersih dan sebagian kecil masih menggunakan sumur sebagai sumber air.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat yang memanfaatkan sumur yang masih bisa dipakai untuk sumber air mereka. Sedangkan sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai sumur atau sumber air telah menggunakan fasilitas air bersih ini.

Pada tahun 2014 telah didirikan koperasi simpan pinjam yang diberi nama Koperasi Simpan Pinjam Tirto Rahayu Widodo. Keberadaan koperasi simpan pinjam ini dimaksudkan agar semua masyarakat dapat merasakan fasilitas air bersih, pasalnya sebagian kecil masyarakat masih memanfaatkan sumur sebagai sumber air. Adanya Koperasi Simpan Pinjam Tirto Rahayu Widodo ini dimaksudkan agar masyarakat yang kurang mampu dapat mengangsur biaya pasang air. Masalahnya sampai saat ini Koperasi Simpan Pinjam Tirto Rahayu Widodo masih belum berjalan.

Untuk pendistribusian air, berdasarkan wawancara dengan masyarakat mereka mengatakan bahwa air lancar, hanya saja kadang terjadi macet atau mati karena terjadi kerusakan atau kebocoran jaringan perpipaan. Selain itu pendistribusian air juga kadang terlambat karena harus dibagi dengan dusun yang lain.

Hal ini dibenarkan oleh pihak pelaksana yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat. Namun masih ada sebagian yang memanfaatkan sumur. Masalah pendistribusian air, hal ini juga dibenarkan oleh pihak pelaksana karena apabila tidak dibagi maka dusun yang lain tidak kebagian air bersih.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat telah menjawab respon masyarakat mengenai kesulitan air bersih di Desa Sendangharjo. Disisi lain tanggapan masyarakat sangat senang dengan adanya program ini karena mereka sudah tidak kesulitan lagi mendapatkan air bersih.

Dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah masyarakat dapat diketahui bahwa mereka merasa sangat senang dengan adanya program ini, karena mereka sudah tidak kesulitan lagi dalam mendapatkan air bersih. Selain itu akses air bersihnya juga mudah hanya tinggal diputar air sudah keluar. Tidak perlu ke luar desa untuk mendapatkan air bersih.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah masyarakat, jika terjadi kebocoran atau kerusakan pipa di rumah penduduk maupun di saluran perpipaan, maka masyarakat bisa langsung

menghubungi petugas untuk segera memperbaiki jaringan pipa yang rusak. Petugas akan segera datang untuk memperbaiki jaringan perpipaan jika mendapat laporan dari masyarakat, selain itu petugas juga rutin setiap 1 bulan melakukan pengecekan.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan atau program menurut William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak negatif maupun positif. Dalam pelaksanaannya, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo secara keseluruhan telah tepat dilaksanakan di Desa Sendangharjo dan Dusun Gampeng artinya telah tepat sasaran dilaksanakan di daerah yang kesulitan air bersih. Mulai dari pemasangan fasilitas air bersih, perhitungan biaya pemasangan, tarif air hingga manfaat telah tepat dilaksanakan di Desa Sendangharjo. Untuk pemasangan fasilitas air bersih, perhitungan biaya pasang, dan tarif air berdasarkan kesepakatan seluruh perwakilan masyarakat, besaran biaya tersebut dilihat dari perekonomian masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah masyarakat, adanya air bersih ini kesejahteraan masyarakat meningkat. Kesehatan masyarakat juga meningkat karena banyak masyarakat yang sudah membangun jamban atau wc, sebelum ada air bersih banyak masyarakat yang membuang kotoran disembarang tempat seperti di sawah. Ekonomi masyarakat turut meningkat karena sekarang sudah banyak yang bekerja tidak seperti dulu yang menghabiskan waktu hanya untuk mencari air. Selain itu keberadaan air dapat menambah produksi usaha seperti yang dirasakan oleh Bapak Mu'alim dan Bapak Makiran yang memiliki usaha.

Pernyataan ini dibenarkan oleh pengurus, pembina dan pengawas

HIPPAM yang mengatakan bahwa banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini berupa kesehatan meningkat, kesejahteraan meningkat, dan ekonomi masyarakat juga meningkat.

KESIMPULAN

Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo ini dievaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari segi efektivitas, secara keseluruhan Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo telah efektif dilaksanakan karena telah berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan yaitu terwujudnya fasilitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara merata sehingga meningkatkan kesadaran hidup bersih dan berdampak langsung pada derajat kesehatan masyarakat.

Dari segi efisiensi, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo telah efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan program air bersih ini sangat murah dengan produk dan layanan yang bagus dibandingkan mencari air di luar desa atau membeli air di luar desa yang harganya lebih mahal. Dalam efisiensi ini, masih ada masyarakat yang terlambat membayar biaya bulanan. Adapun dari segi kecukupan, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo secara keseluruhan telah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan masyarakat merasa puas dengan program tersebut.

Dari segi pemerataan, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat masih belum rata karena masih ada masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air bersih, sedangkan pendistribusian air juga masih dibagi serta jika terjadi kerusakan atau kebocoran jaringan perpipaan pendistribusian air ke masyarakat terhambat. Sudah ada koperasi simpan pinjam yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat untuk

dapat mengangsur biaya pasang air, namun sampai sekarang masih belum berjalan.

Dari segi responsivitas, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat telah menjawab respon masyarakat mengenai kesulitan air bersih di Desa Sendangharjo. Tanggapan masyarakat sangat senang dengan adanya program ini karena mereka sudah tidak kesulitan lagi mendapatkan air bersih. Selain itu respon petugas juga cepat tanggap jika terjadi masalah, sehingga jika terjadi kebocoran atau kerusakan jaringan perpipaan masyarakat dapat langsung melapor ke petugas HIPAM untuk segera memperbaikinya.

Dari segi ketepatan, Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo secara keseluruhan telah tepat dilaksanakan di Desa Sendangharjo dan Dusun Gampeng. Artinya telah tepat dilaksanakan di daerah yang kesulitan air bersih. Tepat baik dari pemasangan hingga manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini.

SARAN

Penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo ini sudah berhasil dalam membantu masyarakat yang kekurangan air bersih, namun terdapat beberapa kendala yang terjadi. Perlu adanya evaluasi untuk mengetahui penyebab terjadinya kendala sehingga dapat diberikan solusi. Berikut saran yang dapat diberikan sebagai solusi, yaitu:

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terlambat membayar biaya bulanan. Tidak hanya sosialisasi namun perlu adanya ketegasan hukum mengenai sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang terlambat dalam membayar.
2. Perlu pembangunan sarana penampungan air cadangan sehingga ketika ada kerusakan atau kebocoran jaringan perpipaan bahkan pemadaman listrik pendistribusian air tidak terhambat dan dengan sarana penampungan air ini pendistribusian air tidak perlu ada pembagian.

3. Selama ini koperasi simpan pinjam Tirta Rahayu Widodo belum berjalan. Perlu adanya penggerak untuk dapat menjalankan koperasi simpan pinjam Tirta Rahayu Widodo tersebut. Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya koperasi tersebut, seperti tersedianya alat-alat kebutuhan air bersih sehingga dapat mempermudah masyarakat yang mengalami kerusakan sarana jaringan air bersih. Disisi lain, keberadaan koperasi simpan pinjam Tirta Rahayu Widodo dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam mengangsur biaya pasang air.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabetha.
- Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro, 2011.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publi Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Irfan, Islamy. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pengurus HIPAM Tirta Rahayu Widodo. 2015. *Profil HIPAM Tirta Rahayu Widodo*. Bojonegoro: HIPAM Tirta Rahayu Widodo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan
- Suaedi, Falih, Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi dan e-Government)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- Waspola, 2003. *Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.